

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S-1)**

OLEH :

NABILA UTARI

1602110104



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 5 Oktober 2020

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NABILA UTARI
NPM : 1602110104

Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH TAHUN 2015-2018**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Ikifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing II

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 5 Oktober 2020

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NABILA UTARI
NPM : 1602110104

Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH TAHUN 2015-2018**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 18 September 2020

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M. Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Zulkifli Umar, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, SE, M. Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Anggota

Irmawati, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 5 Oktober 2020

Yang Menyatakan



Nabila Utari

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nabila Utari
NPM : 1602110104
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH TAHUN 2015-2018

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 5 Oktober 2020

Yang Menyatakan,




Nabila Utari

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat Nya yang telah melimpahkan rahmat dalam penyusunan skripsi ini, dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh Tahun 2015-2018.”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Tarmizi Husein dan Ibunda tercinta Kamariah Mahmud yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak DR. H. Aslam Nur, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, M.Si selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak H. Zulkifli Umar, SE,M.Si.Ak, CA dan Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan dan bimbingannya semenjak dari pertama hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengikuti kuliah pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

6. Pimpinan dan semua karyawan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh, yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan informasi untuk skripsi ini.
7. Para sahabatku tercinta (Avella, Ninda, Rizky, Fadhil, Thoriq, Junanda, Ajie, dan Dhani) yang diberi julukan “INSANE PASSION”, yang telah banyak memberikan bantuan serta semangat yang tiada hentinya dalam suka maupun duka selama kuliah sampai tahap penyelesaian tugas akhir.
8. Seluruh teman-teman Taekwondo SRTC yang telah banyak memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya dalam suka maupun duka selama kuliah sampai tahap penyelesaian tugas akhir.
9. Para teman seperjuangan SMK (Mala, Cina, dan Ica) yang telah banyak memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya dalam suka maupun duka selama kuliah sampai tahap penyelesaian tugas akhir.
10. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini masih banyak kekurangannya sehingga kritik dan saran yang membangun selalu penulis nantikan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020

Penulis,

Nabila Utari

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Pengertian Laporan Keuangan Dan Kinerja Keuangan	8
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan	8
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9
2.2 Pengertian Kinerja Keuangan.....	11
2.2.1 Pengertian Kinerja	11
2.2.2 Kinerja Keuangan	12
2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan.....	13
2.4 Pengertian Dan Jenis-Jenis Rasio Keuangan.....	14
2.4.1 Rasio Keuangan.....	14
2.5 Jenis-Jenis Rasio Keuangan	14
2.5.1 Rasio Efektivitas	14
2.5.2 Rasio Efisiensi	15
2.6 Penelitian Sebelumnya	17
2.7 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	22
3.1.1 Tujuan Penelitian	22
3.1.2 Jenis Penelitian.....	22
3.1.3 Tingkat Intervensi Penelitian	23
3.1.4 Horizon Waktu Studi	23
3.1.5 Unit Analisis	23
3.2 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	24
3.3 Teknik Analisis Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	28
4.1.1	Sejarah Singkat Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	28
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	29
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	30
4.2	Hasil Penelitian.....	34
4.2.1	Hasil Rasio Efektivitas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	34
4.2.2	Hasil Rasio Efisiensi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	35
4.3	Analisis Hasil Penelitian	37
4.3.1	Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	37
4.3.2	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	38
4.4	Evaluasi Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh ..	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	42
5.2	Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA 43

LAMPIRAN 46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Laporan Realisasi dan Anggaran Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2015-2018 5
Tabel 2.1	Pola Hubungan Kemandirian Dan Kemampuan Daerah 15
Tabel 2.2	Rasio Efisiensi Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja... 16
Tabel 2.3	Penelitian Sebelumnya..... 19
Tabel 3.1	Pola Hubungan Kemandirian Dan Kemampuan Daerah 26
Tabel 3.2	Rasio Efisiensi Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja ... 27
Tabel 4.1	Pola Hubungan Kemandirian Dan Kemampuan Daerah 34
Tabel 4.2	Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja 36
Tabel 4.3	Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2015-2018..... 37
Tabel 4.4	Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2015-2018 39

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	33

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH TAHUN 2015-2018

Oleh

NABILA UTARI
NPM : 1602110104

Pembimbing 1 : H. Zulkifli Umar, SE, M.Si.Ak, CA

Pembimbing 2 : Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2015-2018. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh pada tahun anggaran 2015-2016 berada di kategori Efektif dan tahun anggaran 2017-2018 berada di kategori tidak efektif dan Tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh pada tahun anggaran 2015-2016 berada di kategori kurang efisien, pada tahun anggaran 2017-2018 berada di kategori cukup efisien.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Efektivitas, dan Efisiensi

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH TAHUN 2015-2018**

Oleh

**NABILA UTARI
NPM : 1602110104**

Pembimbing 1 : H. Zulkifli Umar, SE, M.Si.Ak, CA
Pembimbing 2 : Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Aceh Public Housing and Settlement Service by using effectiveness ratios and efficiency ratios. This type of research is descriptive qualitative. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data is in the form of interviews and secondary data is in the form of the Budget Realization Report (LRA) of the 2015-2018 Aceh Public Housing and Settlement Service. Based on the results of the study, it can be seen that the level of effectiveness of the Aceh Public Housing and Settlement Service budgets in the 2015-2016 fiscal year is in the Effective category and the 2017-2018 fiscal year is in the ineffective category and the efficiency level of the Aceh Public Housing and Settlement Service budgets. in the 2015-2016 fiscal year it is in the inefficient category, in the 2017-2018 budget year it is in the quite efficient category.

Keyword : Financial Performance, Effectiveness, and Efficiency

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Kebijakan keuangan pemerintah daerah mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan atau pendapatan dan kebijakan pengeluaran. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, pemerintah daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Sedangkan di bidang pengeluaran, pemerintah daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

Kinerja suatu lembaga pemerintah, baik kinerja keuangan maupun kinerja–kinerja lainnya dilembaga pemerintah tersebut tentu saja sangat bergantung dari operasional lembaga pemerintah itu sendiri. Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan banyak dilakukan dengan menggunakan alat ukur kinerja yang kadang berbeda. Untuk menganalisis laporan keuangan, maka salah satu metode pengukuran kinerja keuangan suatu organisasi adalah analisis rasio keuangan.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi pemerintah aceh antara lain: Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonomi maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya

pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Lahirnya Undang-Undang (UUD) No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan ekonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia (SDM), organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan analisis rasio keuangan, pemerintah daerah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugasnya, mengukur efektivitas dan efisiensi kemampuan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja keuangan juga mengukur aktivitas pemerintahan daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya apakah lebih dominan pada belanja rutin atau belanja pembangunan, serta dalam pertumbuhan bagaimana pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan maupun meningkatkan kinerja yang telah dicapainya, serta kebutuhan fiskal untuk mendukung pelayanan publik bagi masyarakat diwilayah kerjanya, kapasitas fiskal yang merupakan ukuran apakah daerah mampu untuk membiayai sendiri kebutuhan fiskalnya dalam upaya fiskal untuk mengetahui bagaimana pengaruh laju pertumbuhan domestik dengan PAD nya.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola oleh pemerintah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai kelulusan didalam menggunakan dana-dana untuk

kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh merupakan salah satu SKPA (Satuan Kerja Pemerintah Aceh). Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang (UUD) 1945 Pasal 28 ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik, sehat, serta layak untuk ditempati. Pembangunan perumahan dan permukiman selalu menghadapi permasalahan pertanahan, terlebih didaerah perkotaan terkait ketersediaan lahan yang terbatas. Kecenderungan pengembangan pertumbuhan penduduk mengarah pada wilayah pinggiran kota sebagai akibat perluasan aktivitas kota. Pusat kota sudah tidak mampu lagi menampung desakan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang terus meningkat mengindikasikan bahwa perkembangan penduduk menyebar ke arah pinggiran kota sehingga sebagai konsekuensinya adalah terjadi perubahan penggunaan lahan diperkotaan. Keterbatasan lahan kosong diperkotaan menjadikan daerah pinggiran kota menjadi alternatif pemecahan masalah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh mengelola pendapatan dan pengeluaran yang bersumber dari hasil retribusi Aceh yaitu pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan pendapatan asli Aceh yang lain.

Dalam penelitian ini penilaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh, berdasarkan berbagai rasio keuangan dan dua (2) indikator, diantaranya: Rasio efektivitas, rasio ini menggambarkan kemampuan yang dicapai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh dalam merealisasikan

pendapatan yang di rencanakan, kemudian di bandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efesiensi, untuk membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran dari 2015 s/d 2018

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Presentase Realisasi (%)
1.	2015	789.616.954.190	599.517.319.252	190.099.634.938	75,93%
2.	2016	789.616.954.190	750.048.357.316	39.568.596.874	94,99%
3.	2017	930.952.600.893	439.139.828.456	491.812.772.437	47,17%
4.	2018	930.952.600.893	498.824.511.473	432.128.089.419	53,58%

Sumber: Dinas Perkim Aceh, 2020

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa pencapaian Realisasi anggaran dinas perkim Aceh mengalami penurunan ditahun 2017 dan 2018, yakni hanya mencapai 47,17% dan 53,58%. Tahun 2017 dan 2018 terdapat sisa anggaran yang nilainya mencapai 491.812.772.437 dan 432.128.089.419, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang terealisasi tidak mampu menyerap seluruh anggaran yang telah ada. Besarnya sisa anggaran mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Dinas Perkim Aceh tidak berjalan efektif karena tidak sesuai dengan target yang dicapai.

Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini bahwa dari tahun ke tahun selanjutnya kinerja keuangan pada Dinas Perkim semakin kurang efektif karena tingkat presentasenya semakin rendah atau jumlah sisa anggaran semakin tinggi. Jadi,

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pada Dinas Perkim Aceh tidak mencapai angka 100%.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan , peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2015 – 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2015 – 2018”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis “Kinerja Keuangan Daerah Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2015 – 2018”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan tentang kinerja keuangan daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khazanah penelitian dan sebagai dokumentasi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori dan literature yang diperoleh dibangku kuliah, serta menerapkan pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir ilmiah dalam bidang Keuangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2015 – 2018”.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pengertian Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2010:5) pengertian laporan keuangan terdiri dari neraca dan suatu perhitungan laba-rugi serta laporan mengenai perubahan ekuitas. Neraca tersebut menunjukkan atau menggambarkan jumlah suatu aset, kewajiban dan juga mengenai ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja pemerintahan dalam satu periode. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan merupakan kewajiban setiap pemerintahan untuk membuat dan melaporkannya pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan pemerintahan sekarang dan kedepan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya.

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu pemerintahan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintahan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Secara sederhana pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Salah satu alat penting dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi analisis laporan keuangan adalah laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 Revisi Tahun 2013, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu pemerintahan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan pemerintahan sekarang dan kedepan.

2.1.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen pokok laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang mencakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori :
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonom asli daerah
 - b) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang di alokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah
Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah Pusat.
2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
 - a) Belanja Aparatur Daerah
Belanja Aparatur Daerah merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan Dinas, pembelian bangunan gedung dan lain sebagainya
 - b) Belanja Pelayanan Publik
Belanja Pelayanan Publik merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan lain sebagainya
 - c) Belanja bagi hasil dan dan bantuan keuangan.

3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam pengangguran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi :
 - a) Sumber Penerimaan Daerah, yaitu :
 - 1) Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu
 - 2) Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - 3) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
 - 4) Transfer dari dana cadangan
 - b) Sumber Pengeluaran Daerah, yaitu :
 - 1) Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo
 - 2) Penyertaan modal
 - 3) Transfer ke dana cadangan
 - 4) Sisa lebih anggaran tahun sekarang
 - c) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu periode entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
 - d) Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2 Pengertian Kinerja Keuangan

2.2.1. Pengertian Kinerja

Fahmi (2012:2) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Penilaian tentang kinerja individu staf atau karyawan semakin penting ketika suatu organisasi atau lembaga akan melakukan reposisi staf atau karyawan. Sedangkan Menurut Bastian (2010:2) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis

(*strategic planning*) suatu organisasi. Artinya bagaimana organisasi/lembaga harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja, dan apakah masing-masing staf atau karyawan sudah diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam pekerjaannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

2.2.2. Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2012:2) Kinerja keuangan adalah gambaran tentang keberhasilan perusahaan berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya. Menurut Hery (2015) kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.

Menurut Agung (2012:6) kinerja keuangan merupakan hasil dari pelaporan keuangan berdasarkan standar keuangan yang telah ditetapkan. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah evaluasi laporan keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas pada waktu dan jangka tertentu. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.

2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Syahrani (2014:5) pengukuran kinerja memiliki esensi yang jelas karena melalui pengukuran kinerja dapat diketahui aspek-aspek apa yang dapat dijadikan parameter mengenai kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Pengukuran kinerja dapat dilihat melalui beberapa aspek sebagai berikut :

1. *Quality*, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang di harapkan.
2. *Quantity*, merupakan jumlah yang dihasilkan misalnya jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan dan lain-lain.
3. *Timeline*, merupakan tingkat sejauh mana kegiatan dilaksanakan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi, output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain.
4. *Cost Effectiveness*, sejauh mana penggunaan daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya.
5. *Need For Supervision*, merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan tanpa seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.
6. *Interpersonal Impact*, menilai tingkat sejauh mana pegawai memelihara harga diri, nama baik dan kerjasama diantara rekan kerja.

Menurut Ulum (2012:20) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan adalah sebuah tolak ukur dalam suatu penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya karena melalui pengukuran kinerja kita dapat mengetahui aspek-aspek apa saja yang dapat dijadikan parameter mengenai kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

2.4. Pengertian dan Jenis-Jenis Rasio Keuangan

2.4.1. Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2010:297) rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan suatu akun laporan keuangan dengan akun lainnya yang mempunyai hubungan yang relavan dan signifikan. Menurut Fahmi (2014:106) rasio keuangan yaitu hasil yang diperoleh dari perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya. Adapun menurut Harahap (2013:297) mendefinisikan rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relavan dan signifikan.

Menurut Lazyra (2016:27) ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan Daerah. Beberapa rasio yang biasa digunakan dalam penelitian ini adalah: rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

2.5. Jenis-jenis Rasio Keuangan

2.5.1. Rasio Efektivitas

Ravianto (2014:11) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Mahsun (2014:187) rasio Efektivitas PAD ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah. ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan jumlah anggaran yang ditargetkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Pola hubungan kemandirian dan kemampuan daerah

Efektivitas Keuangan	Rasio Aktivitas
Efektif	>100%
Efektif berimbang	=100%
Tidak efektif	<100%

Sumber: Mahsun, 2014

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dapat dijelaskan kriteria rasio efektivitas menurut Mahsun (2014) adalah:

1. Jikadiperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif

2.5.2 Rasio Efisiensi

Halim dan Iqbal (2012:163) berpendapat bahwa efesiensi berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara *input* yang

digunakan terhadap *output* yang dihasilkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu target kinerja tertentu (*outcome*) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya yang terendah. Nordiawan dan Hertianti (2011:161) mendefinisikan bahwa efesiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Simanjunyak dan Muklis (2012:17) berpendapat bahwa efisiensi yang direncanakan dengan cara produksi dengan biaya murah tetapi tetap dengan sesuai harapan, baik mutu dan barang yang diproduksi maupun pelayannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efesiensi merupakan sebagai hasil dari usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif, karena hasil yang dicapai dengan penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu maupun benda lainnya. Rumus yang digunakan untuk mengukur efesiensi adalah sebagai berikut (Mahsun, 2014:187):

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Rasio Efesiensi
Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Rasio Efesiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahsun (2014:188)

2.6. Penelitian Sebelumnya

Pada penelitian ini, penulis mencoba menelusuri penelitian lain yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati (2016) yang berjudul "Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013", diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan kabupaten sukoharjo masih belum optimal, walaupun dalam pengelolaan PAD sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Selain itu dalam penggunaan dana nya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi dari pada belanja modal.

Pada penelitian dari Kurnaeli dan Priyo Utomo (2016) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Karyawan Pertamina Lapang Kamojang (Koperlak) Kabupaten Bandung", dapat disimpulkan bahwa *Current Ratio* berada dalam keadaan yang sehat artinya aktiva lancar koperasi dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya (likuid), *Cash Ratio* berada dalam keadaan yang tidak sehat artinya kas dan bank koperasi tidak dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya, *Debt To Total Assets Ratio* berada dalam keadaan yang tidak sehat artinya total aktiva koperasi belum mampu menjamin total hutang koperasi (insolvable), *Debt To Equity Ratio* berada dalam keadaan yang tidak sehat artinya total modal koperasi belum mampu menjamin total hutang koperasi, *Return On Investment* berada dalam keadaan yang kurang sehat artinya koperasi belum mampu menggunakan aktiva secara produktif untuk menghasilkan usaha yang maksimal, dan *Return On Equity* berada dalam keadaan yang sehat artinya bahwamodal yang dimiliki koperasi udah dapat menghasilkan sisa hasil usaha yang maksimal.

Selanjutnya penelitian dari Aldy H.R. Pangkey, Ivonne S. Saerang, dan Joy E. Tulung (2017) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015”, diperoleh kesimpulan bahwa Rasio Kemandirian PAD menunjukkan tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Rasio tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah daerah masih rendah namun dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan daerah terbilang sangat efektif dan dari rasio keserasian belanja daerah menunjukkan keseimbangan antar belanja masih belum seimbang, penyebabnya adalah potensi yang dimiliki masih kurang dikelola baik oleh pemerintah. Jika potensi-potensi berhasil di maksimalkan, maka pajak yang merupakan penopang utama PAD akan semakin meningkat dan akan menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat.

Penelitian dari Marina F. Pandjaitan, Perengkuan Tommy, dan Victoria N. Untu (2018) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016”, dapat disimpulkan bahwa Rata-rata derajat desentralisasi masih sangat rendah, rasio ketergantungan keuangan daerah masih tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah rendah dengan pola konsultatif, rasio belanja operasi terhadap total belanja mendominasi alokasi belanja dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja kurang efisien.

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka hasil penelitian sebelumnya secara ringkas dapat di lihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 (Rahmayati, 2016)	Metode penelitian deskriptif kuantitatif	Kinerja keuangan pemerintah kabupaten sukoharjo masih belum optimal, walaupun dalam pengelolaan PAD sudah efektif sebesar 113,20% dan efesien sebesar 2,60%, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah yakni 15,31%.. Selain itu dalam penggunaan dana nya masih belum berimbang karena sebagian besar danadigunakan untuk belanjaoperasi dari pada belanja modal.	Sama-sama Menggunakan judul penelitian tentang kinerja keuangan	Tempat penelitian, objek penelitian, dan waktu penelitian
2.	Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Karyawan Pertamina Lapang Kamojang (Koperlak) Kabupaten Bandung (Kurnaeli, Utomo, 2016)	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<i>Current Ratio</i> berada dalam keadaan yang sehat sebesar 150,32% artinya aktiva lancer koperasi dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya (likuid), <i>Cash Ratio</i> berada dalam keadaan yang tidak sehat sebesar 1,06% artinya kas dan bank koperasi tidak dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya, <i>Debt To Total Assets Ratio</i> berada dalam keadaan yang tidak sehat sebesar 84,91% artinya total aktiva koperasi belum mampu menjamin total hutang koperasi (insolvable), <i>Debt To Equity Ratio</i> berada dalam keadaan yg tidak sehat yakni 562,94% artinya total modal koperasi belum mampu menjamin total hutang koperasi, <i>Return On Investment</i> berada dalam keadaan yang kurang sehat sebesar 2,03% artinya koperasi belummampu menggunakan aktiva secara produktif utk menghasilkan usaha yg maksimal, dan <i>Return On Equity</i> berada dalam keadaan yg sehat sebesar 20,40% artinya bahwa	Sama-sama Menggunakan judul penelitian tentang kinerja keuangan	Tempat penelitian, objek penelitian, dan waktu penelitian

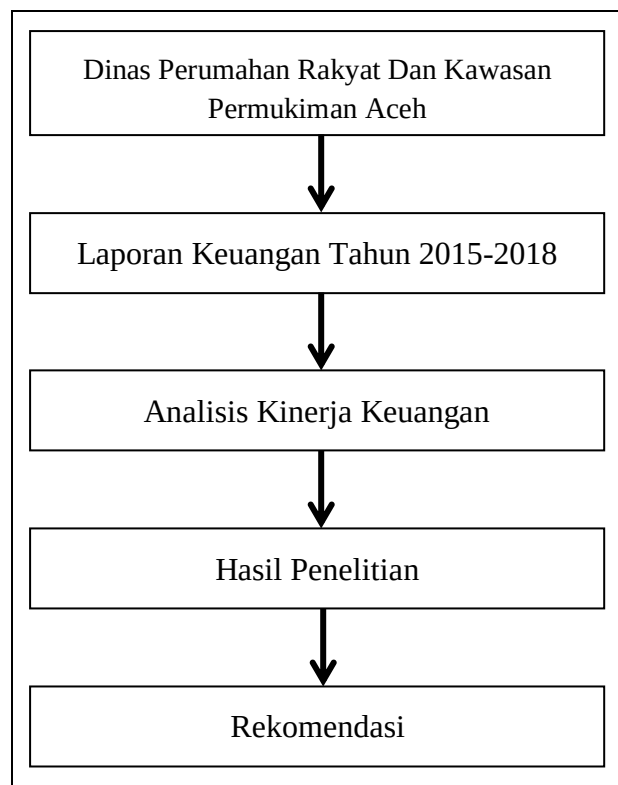
Lanjutan Tabel 2.2

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Modal yg dimiliki koperasi sudah dapat menghasilkan sisa hasil usaha yg maksimal.		
3.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015 (Pangkey, Saerang, Tulung, 2017)	Metode penelitian deskriptif kuantitatif	Rasio Kemandirian PAD menunjukkan tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah sebesar 3,17%. Rasio tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah daerah masih rendah sebesar 2,73% namun dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan daerah terbilang sangat efektif sebesar 104,57% dan dari rasio keserasian belanja daerah menunjukkan keseimbangan antar belanja masih belum seimbang, penyebabnya adalah potensi yang dimiliki masih kurang dikelola baik oleh pemerintah. Jika potensi-potensi berhasil di maksimalkan, maka pajak yang merupakan penopang utama PAD akan semakin meningkat dan akan menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat .	Sama-sama Menggunakan judul penelitian tentang kinerja keuangan	Tempat penelitian, objek penelitian, dan waktu penelitian
4.	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011 – 2016 (Pandjaitan, Tommy, dan Untu, 2018)	Metode penelitian deskriptif kuantitatif	Rata-rata derajat desentralisasi masih sangat rendah sebesar 17,88%, rasio ketergantungan keuangan daerah masih tinggi yakni sebesar 78,85%, rasio kemandirian keuangan daerah rendah sebesar 22,86% dengan pola konsultatif, rasio belanja operasi terhdap total belanja mendominasi alokasi belanja dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 18,51% dan rasio efisiensi belanja kurang efisien yakni sebesar 86,26%.	Sama-sama menggunakan judul penelitian tentang kinerja keuangan	Tempat penelitian, objek penelitian, dan waktu penelitian

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018:93) mengemukakan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Fungsi penyusunan kerangka pemikiran untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penyelesaian suatu permasalahan, desain penelitian berisi tentang langkah-langkah kegiatan penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2015-2018.

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, kemudian dianalisis dengan rasio keuangan yang telah ditetapkan. Hasil analisis rasio keuangan tersebut akan dibuat kesimpulan dan kemudian akan direkomendasikan kepada Dinas Perkim. Secara ringkas kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan maksud untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai Analisis Kinerja Keuangan. Menurut Sekaran (2017:152) “Desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien dan efektif”. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat intervensi peneliti, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan untuk dianalisis lagi berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan untuk mengambil kesimpulan dan saran.

3.1.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi untuk melihat, mengungkapkan atau menggambarkan secara tepat hal-hal yang sedang dihadapi sekarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan untuk mengambil kesimpulan dan saran (Umar, 2013:142)

Informasi yang telah diperoleh, selanjutnya dilengkapi dengan perubahan dari penulis sendiri, pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian deskriptif ini merupakan penyidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan akhirnya menarik kesimpulan.

3.1.3 Tingkat Interverensi Peneliti

Tingkat interverensi peneliti dalam penelitian ini adalah interverensi minimal dimana peneliti melakukan penelitiannya tanpa menginterverensi Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2015-2018.

3.1.4 Horizon Waktu

Penelitian ini menggunakan metode *time series* yaitu data yang memiliki runtun waktu yang lebih dari satu tahun pada suatu objek atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu objek. Dalam penelitian ini memiliki runtun waktu 4 (empat) tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

3.1.5 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data. Unit analisis individual adalah data yang dikumpulkan dari setiap individu unit. Jika peneliti berminat mempelajari interaksi antar dua orang maka dikenal sebagai unit analisis pasangan (*dyads*). Tetapi jika pernyataan masalah berkaitan dengan efektivitas kelompok, maka unit analisis adalah pada tingkat kelompok dan selanjutnya unit analisis pada tingkat lainnya. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat Informasi yang dikumpulkan serta tingkat dimana data dijumlahkan untuk

analisis adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Peneliti perlu memutuskan unit analisis bahkan saat kita merumuskan pernyataan penelitian karena metode pengumpulan data ditentukan oleh tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisis.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan sumber dimana data dapat diperoleh peneliti. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. Menurut Sutopo (2014:56). “Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh”. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yakni melalui wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan realisasi anggaran (LRA) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh.

Menurut Sugiyono (2012) teknik pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian.

- a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada Kepala bagian Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2015-

2018. Untuk mengetahui sejarah perusahaan, struktur organisasi, kinerja keuangan, serta cara mengatasi masalah yang timbul.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan dasar acuan pencatatan yang telah tersedia berupa laporan keuangan perusahaan.

c. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan melihat pembinaan yang terjadi.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode analisa yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Sugiyono (2014:21) adalah sebagai berikut: “Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yaitu mengenai Kinerja Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2015-2018 ini menggambarkan

kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan jumlah anggaran yang ditargetkan (Mahsun, 2014:187).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Pola hubungan kemandirian dan kemampuan daerah

Efektivitas Keuangan	Rasio Aktivitas
Efektif	>100%
Efektif berimbang	=100%
Tidak efektif	<100%

Sumber: Mahsun, 2014

2. Rasio Efesiensi

Rasio Efesiensi pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2015-2018 diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Mahsun (2014:187) :

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman untuk melihat tingkat efesiensi anggaran belanja, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Rasio Efisiensi
Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Rasio Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahsun (2014:188)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh atau yang disingkat dengan Dinas PERKIM merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, yang beralamat di Lamtemen Timur Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh merupakan reorganisasi dari Dinas Cipta Karya Aceh. Berstatus Tipe A dengan beban kerja yang besar, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pembinaan, tugas dan wewenang, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan pembiayaan, hak dan kewajiban, dan peran masyarakat. Selain itu juga mempunyai tugas pembantuan di bidang keciptakaryaan.

Sebagai salah satu Perangkat Kerja Pemerintah Provinsi Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan

Sumber: Data diolah (2020)

Kawasan Permukiman Aceh. Sampai dengan tahun 2017, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan dukungan tenaga Pegawai Harian Lepas Administrasi dan Satuan Pengaman sebanyak 424 orang.

Adapun pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh meliputi perencanaan sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota, pengaturan; yang meliputi penyediaan tanah, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pendanaan dan pembiayaan, pengendalian; meliputi rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman, serta pengawasan; yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

Visi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh yaitu :

Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani

Misi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh yaitu:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.

4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi.
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

Merujuk kepada Peraturan Gubernur Aceh No. 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, maka uraian tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh adalah sebagai berikut :

1. Kepala dinas

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang tata bangunan, perumahan, penyehatan lingkungan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Aceh 2017-2022 Gambaran Pelayanan 17 permukiman, prasarana dan sarana sesuai dengan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi dan fungsi melaksanakan perencanaan umum, pemograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan hukum dan perundangan, pengelolaan barang milik negaram kerumah tanggaan dan pelayanan administrasi kantor.

3. Bidang Tata Bangunan

Bidang Tata Bangunan merupakan pelaksana teknis di bidang penataan bangunan, pengendalian teknik, kelayakan dan pemanfaatan bangunan. Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan kegiatan penataan bangunan, pembinaan inventarisasi bangunan milik negara, pengendalian teknik, serta kelayakan dan pemanfaatan bangunan.

4. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

5. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi menyusun kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan penyehatan lingkungan permukiman serta

pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan permukiman serta fasilitasi penyediaan tanah

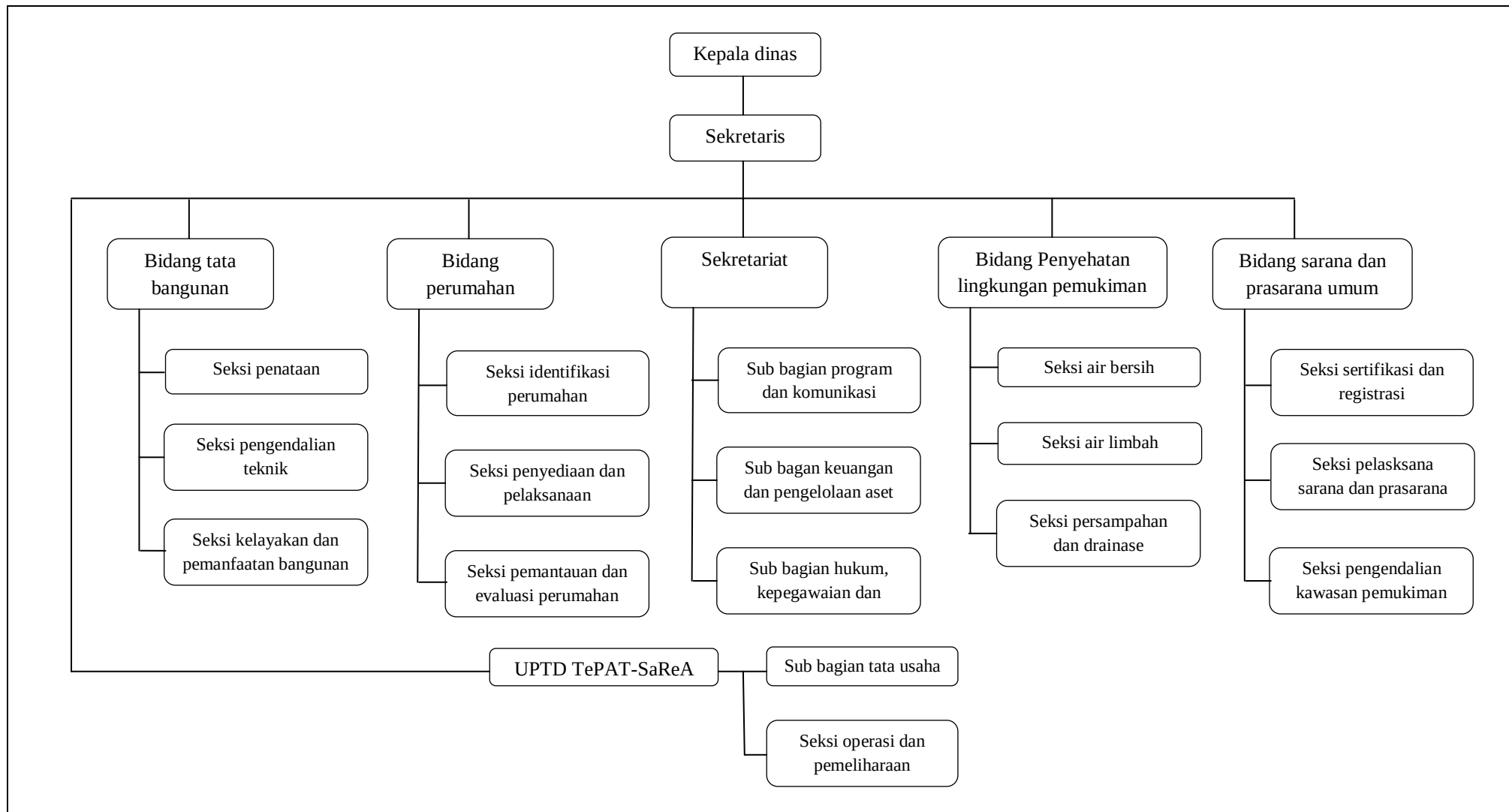
6. Bidang Sarana Dan Prasarana Umum

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Bidang Saranadan Prasarana Umum mempunyai tugas dan fungsi yaitu pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, Saranadan Prasarana Umum dan Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, penyediaan saranadan prasarana umum

7. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Terpadu Sampah Regional Aceh (TePAT-SaReA)

UPTD TePAT-SaReA mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dan pengelolaan sampah secara terpadu dalam wilayah provinsi aceh dengan wilayah kerja.

Berikut adalah gambar struktur organisasi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Aceh.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh

Sumber: Data diolah (2020)

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Rasio Efektivitas Keuangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh

Rasio efektivitas PAD ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah anggaran yang ditargetkan.

Untuk melihat tingkat efektivitas anggaran belanja, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Pola hubungan kemandirian dan kemampuan daerah

Efektivitas Keuangan	Rasio Aktivitas
Efektif	>100%
Efektif berimbang	=100%
Tidak efektif	<100%

Sumber: Mahsun, 2014

Berdasarkan hasil penelitian pada analisis kinerja keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh tahun 2015-2018, maka Rasio Efektivitas sebagai berikut:

1. Tahun 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{599.533.838.830,00}{789.616.954.190,00} \times 100\% = 75,93\%
 \end{aligned}$$

2. Tahun 2016

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{750.088.605.813,00}{789.616.954.190,00} \times 100\% = 94,99\%\end{aligned}$$

3. Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{439.149.878.456,00}{930.952.600.893,00} \times 100\% = 47,17\%\end{aligned}$$

4. Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{499.703.902.934,88}{930.952.600.893,00} \times 100\% = 53,68\%\end{aligned}$$

4.2.2 Hasil Rasio Efisiensi Keuangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh

Halim dan Iqbal (2012:163) menyatakan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara *input* yang digunakan terhadap *output* yang dihasilkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu target kinerja tertentu (*outcome*) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya yang terendah. Untuk melihat tingkat efisiensi anggaran belanja, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Rasio Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahsun (2014:188)

Berdasarkan hasil pengamatan pada laporan anggaran belanja dan realisasi belanja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh tahun anggaran 2014-2018, maka Rasio Efisiensi sebagai berikut :

1. Tahun 2015

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{580.808.058.382,00}{599.533.838.830,00} \times 100\% = 96,88\%\end{aligned}$$

2. Tahun 2016

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{730.743.784.949,00}{750.088.605.813,00} \times 100\% = 97,42\%\end{aligned}$$

3. Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{379.247.969.741,00}{439.149.878.456,00} \times 100\% = 86,36\%\end{aligned}$$

4. Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{438.952.250.130,88}{499.703.902.934,88} \times 100\% = 87,84\%\end{aligned}$$

4.3 Analisis Hasil Penelitian**4.3.1 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh**

Berdasarkan hasil penelitian analisis kinerja keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh dapat dilihat lebih jelas pada tabel Rasio Efektivitas sebagai berikut ini :

Tabel 4.3
Rasio Efektivitas
Tahun Anggaran 2015-2018

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Tingkat Efektivitas	Rasio
2015	789.616.954.190,00	599.533.838.830,00	75,93%	kurang efektif
2016	789.616.954.190,00	750.088.605.813,00	94,99%	efektif
2017	930.952.600.893,00	439.149.878.456,00	47,17%	tidak efektif
2018	930.952.600.893,00	499.703.902.934,88	53,68%	tidak efektif

Sumber : Data diolah (2020)

Analisis efektivitas anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun anggaran 2015, 2016, 2017 dan 2018 efektivitas anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh berada di kategori efektif, kurang efektif dan tidak efektif dengan nilai rasio efektivitas sebesar 75,93%, 94,99%, 47,17% dan 53,68%. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan anggaran

belanja masih belum berjalan sesuai dengan target anggaran. Tidak efektif dan kurang efektifnya anggaran belanja terjadi karena lemahnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) dalam mengatur target anggaran, sehingga realisasi anggaran belanja tidak sesuai dengan target belanja yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) belum dapat memproyeksi anggaran secara tepat. Dampak yang terjadi dengan tidak efektifnya anggaran belanja ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) akan mengurangi kepercayaan pemerintah pusat dalam menganggarkan dana kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM).

Namun berbeda dengan tahun 2015 dan 2016, pada tahun tersebut anggaran belanja berjalan dengan baik. Target anggaran yang telah dianggarkan sangat tepat sehingga sesuai dengan perencanaan. Agar anggaran menjadi efektif, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) terus membenahi kebijakan dalam mengatur target anggaran yang akan ditetapkan dan melihat potensi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) dalam merealisasikan target anggaran yang telah ditetapkan.

4.3.2 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh

Berdasarkan hasil penelitian analisis kinerja keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh dapat dilihat lebih jelas pada tabel Rasio Efisiensi sebagai berikut ini :

Tabel 4.4
Rasio Efisiensi
Tahun Anggaran 2015-2018

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Tingkat Efisiensi	Rasio
2015	599.533.838.830,00	580.808.058.382,00	96,88%	kurang efisien
2016	750.088.605.813,00	730.743.784.949,00	97,42%	kurang efisien
2017	439.149.878.456,00	379.247.969.741,00	86,36%	cukup efisien
2018	499.703.902.934,88	438.952.250.130,88	87,84%	cukup efisien

Sumber : Data diolah (2020)

Analisis efisiensi anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun anggaran 2015 dan 2016, efisiensi anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) berada di kategori kurang efisien dengan nilai rasio sebesar 96,88% dan 97,42%. Pada tahun anggaran 2017 dan 2018, efisiensi anggaran belanja turun dari kategori kurang efisien menjadi cukup efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 86,36% dan 87,84%. Hal ini berarti bahwa belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) cenderung tidak hemat dalam melakukan pengeluaran. Kurang efisiennya anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) terjadi karena adanya kecenderungan pemborosan dalam pengalokasian anggaran belanja. Dengan tidak efisiennya anggaran belanja, dampak yang terjadi adalah akan mengurangi kepercayaan pemerintah pusat dalam menganggarkan dana kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM). Solusi dari ketidakefisiennya anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) adalah harus mengevaluasi ulang sektor kegiatan yang akan didanai sehingga dana yang

digunakan dapat tepat sasaran dan agar tidak adanya kebocoran dana anggaran belanja.

4.4 Evaluasi Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh

Dari hasil pengamatan pada laporan anggaran dan realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) tahun anggaran 2015-2018, maka efektivitas pelaksanaan belanja tahun anggaran tahun 2015-2018 berada dikategori efektif dan kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) mengalami kenaikan dan penurunan kestabilan kinerja terkait dalam hal belanja. Agar dapat memperbaiki kinerja dalam hal ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) sebaiknya mengevaluasi kembali apa yang menjadi keperluan untuk belanja serta menetapkan anggaran belanja sesuai dengan keperluan. Dengan demikian, pelaksanaan pengeluaran menjadi lebih efektif serta stabil.

Dari hasil pengamatan pada laporan anggaran dan realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) tahun anggaran 2015-2018, maka efisiensi pelaksanaan belanja tahun anggaran tahun 2015-2018 berada dikategori kurang efisien dan cukup efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) belum berhasil meningkatkan kinerjanya sehingga belum mampu mengefisienkan penggunaan dana belanja. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan

output sebesar-besarnya (*spending well.*) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) harus mampu menekan biaya serendah mungkin agar meningkatkan kinerja, sehingga tingkat efisiensi belanja menjadi lebih efisien dan stabil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang dilakukan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) pada tahun anggaran 2015-2016 sebesar 75,93% dan 94,99% berada di kategori efektif dan tahun anggaran 2017-2018 sebesar 47,17% dan 53,68% berada di kategori tidak efektif.
2. Tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) pada tahun anggaran 2015-2016 sebesar 96,88% dan 97,42% berada di kategori kurang efisien, pada tahun anggaran 2017-2018 sebesar 86,36% dan 87,84% berada di kategori cukup efisien.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) agar mampu menjaga dan meningkatkan kinerja efektivitas belanja.
2. Diharapkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) agar mampu menjaga dan meningkatkan kinerja efisiensi belanja.
3. Dalam menyusun target anggaran sebaiknya dilakukan analisis yang tepat agar realisasi anggaran tersebut dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Gunawan. (2012). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. Periode Tahun 2009-2011*
- Aldy H.R Pangkey. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011 – 2015*. Vol. 5 No. 2, hlm 2848 – 2858.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit. Erlangga: Jakarta
- Fahmi, Irham. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Fahmi, Irham. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2013). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS
- Hery (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. Gramedia
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers: Jakarta
- Kurnaeli. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Karyawan Pertamina Lapangan Kamojang (Koperlak) Kabupaten Bandung*. Vol. 15 No. 02, hlm 001 – 008.
- Lazyra. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahsun, Mohamad. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPEF

- Marina F. Pandjaitan. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 – 2016*. Vol. 6 No. 3, hlm 1398 – 1407.
- Munawir, S. (2010). *Analisis Informasi Keuangan*. Yogyakarta : Liberty..
- Peraturan Pemerintah. (2010) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahmayati. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerinah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011 – 2013*. Vol. 1 No. 1, hlm 2503 – 3689.
- Ravianto J. (2014). *Produktivitas Dan Pengukuran*. Jakarta : Binaman Aksara.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.
- Republik indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 Ayat 1, Republik Indonesia, Jakarta.
- Rusdianto, Ujang. (2013). *CSR Communication a Framework for PR Practitioners*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sekaran, Uma. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan. Pengembangan-Keahlian*. Jakarta. Salemba Empat.
- Simanjutak, Timbul Hamonangan Dan Imam Muklis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2018). *Statiska Untuk Penelitian Bisnis*, Bandung. Alfabeta.
- Sutopo. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS
- Suyanto dan Susila. (2015). *Metodologi Penelitian Cross Sectional*. Klaten: Boss
- Syahrani. (2014). *Analisis Kinertja Aparatur Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Nunukan*. Jurnal Administrative Reform, 2014, 2(3):1-10
- Umar, Husein. (2013). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persaja



PEMERINTAH ACEH
SKPD : 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016 DAN 2015

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	10.000.000,00	40.248.497,00	402,48	16.519.578,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00	40.248.497,00	402,48	16.519.578,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	10.000.000,00	11.450.000,00	114,50	10.000.000,00
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	11.450.000,00	114,50	10.000.000,00
4.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.000.000,00	11.450.000,00	114,50	10.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	-	28.798.497,00	-	6.519.578,00
4.1.4.07.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	28.798.497,00	-	6.519.578,00
4.1.4.07.03.	Bidang Pekerjaan Umum	-	28.798.497,00	-	6.519.578,00
5.	BELANJA	789.626.954.190,00	750.088.605.813,00	94,99	599.533.838.830,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.672.144.419,00	19.344.820.864,00	98,34	18.725.780.448,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	19.672.144.419,00	19.344.820.864,00	98,34	18.725.780.448,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.078.778.329,00	12.065.672.129,00	99,89	10.911.181.788,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	9.494.726.774,00	9.491.333.750,00	99,96	8.574.349.020,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	889.763.849,00	889.700.642,00	99,99	854.690.845,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	269.230.000,00	267.850.000,00	99,49	297.320.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	4.875.000,00	-	-	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	468.975.000,00	465.770.000,00	99,32	462.335.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	564.983.718,00	564.803.580,00	99,97	576.265.080,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	74.664.200,00	74.662.474,00	100,00	146.023.677,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	143.000,00	142.668,00	99,77	198.166,00
5.1.1.01.25.	Tunjangan Iuran JKK PNS	19.488.348,00	19.480.940,00	99,96	-
5.1.1.01.26.	Tunjangan Iuran JKM PNS	24.351.480,00	24.351.206,00	100,00	-
5.1.1.01.31.	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	267.576.960,00	267.576.869,00	100,00	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.593.366.090,00	7.279.148.735,00	95,86	7.814.598.660,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	678.000.000,00	639.000.000,00	94,25	1.096.500.000,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	6.255.846.090,00	5.993.688.735,00	95,81	6.090.498.660,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	659.520.000,00	646.460.000,00	98,02	627.600.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	769.954.809.771,00	730.743.784.949,00	94,91	580.808.058.382,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	9.003.772.000,00	8.537.523.000,00	94,82	7.052.912.500,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.260.060.000,00	2.135.710.000,00	94,50	1.656.800.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	254.400.000,00	232.000.000,00	91,19	22.400.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	123.000.000,00	122.500.000,00	99,59	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	553.400.000,00	551.850.000,00	99,72	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.190.500.000,00	1.090.600.000,00	91,61	1.498.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.06.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	138.760.000,00	138.760.000,00	100,00	136.400.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.726.912.000,00	6.385.145.000,00	94,92	5.396.112.500,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.893.200.000,00	5.758.570.000,00	97,72	4.780.950.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	833.712.000,00	626.575.000,00	75,15	604.302.500,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Peneliti	-	-	-	10.860.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	16.800.000,00	16.668.000,00	99,21	-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	16.800.000,00	16.668.000,00	99,21	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.223.549.603,00	315.724.063.408,00	90,41	389.550.355.156,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	729.620.615,00	618.196.141,00	84,73	525.949.851,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	480.844.465,00	452.172.077,00	94,04	401.163.300,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.826.150,00	8.134.900,00	58,84	16.696.505,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.150.000,00	6.060.000,00	49,88	4.305.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50.000.000,00	49.641.000,00	99,28	49.500.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	172.800.000,00	102.188.164,00	59,14	54.285.046,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	368.000.000,00	288.271.000,00	78,33	670.213.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	-	-	-	24.000.000,00
5.2.2.02.07.	Belanja tas kegiatan/perlengkapan peserta	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	10.500.000,00
5.2.2.02.11.	Belanja dokumentasi	20.000.000,00	9.228.000,00	46,14	2.980.000,00
5.2.2.02.18.	Belanja bahan publikasi	234.400.000,00	177.492.000,00	75,72	508.833.000,00
5.2.2.02.22.	Belanja bahan kelengkapan lapangan	92.000.000,00	79.951.000,00	86,90	123.900.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.252.837.000,00	1.609.969.689,00	71,46	2.568.205.724,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	10.000.000,00	2.316.340,00	23,16	2.137.144,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	35.400.000,00	35.358.805,00	99,88	389.385,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.630.360.000,00	1.152.793.564,00	70,71	1.816.401.456,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	18.792.000,00	18.531.000,00	98,61	18.687.600,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	138.000.000,00	61.563.480,00	44,61	62.043.451,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja jasa publikasi	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	81.200.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	110.485.000,00	75.696.000,00	68,51	196.681.688,00
5.2.2.03.14.	Belanja jasa transport dan uang saku peserta	155.500.000,00	111.310.500,00	71,58	192.775.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja jasa cleaning service	150.000.000,00	149.100.000,00	99,40	197.890.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.104.269.000,00	745.367.425,00	67,50	483.837.918,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	542.400.000,00	429.593.850,00	79,20	240.873.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	-	-	97.257.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	418.685.000,00	261.623.050,00	62,49	100.965.060,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	984.000,00	-	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	142.200.000,00	54.150.525,00	38,08	44.742.858,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	662.149.128,00	624.177.080,00	94,27	839.759.300,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	157.999.128,00	141.350.780,00	89,46	260.586.100,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	476.650.000,00	455.326.300,00	95,53	551.712.700,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	27.460.500,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	275.500.000,00	241.260.000,00	87,57	176.020.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	161.000.000,00	160.960.000,00	99,98	155.820.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	114.500.000,00	80.300.000,00	70,13	20.200.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	4.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	4.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	674.300.000,00	303.543.000,00	45,02	302.740.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	195.900.000,00	48.593.000,00	24,81	81.195.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	27.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	451.400.000,00	254.950.000,00	56,48	221.545.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	241.450.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	241.450.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.336.170.000,00	2.922.986.482,00	67,41	3.178.555.220,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.564.340.000,00	2.399.539.420,00	67,32	2.287.325.897,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	771.830.000,00	523.447.062,00	67,82	891.229.323,00
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	11.931.000.000,00	11.517.315.000,00	96,53	20.989.640.450,00
5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	400.000.000,00	371.667.000,00	92,92	1.307.917.000,00
5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.635.000.000,00	1.543.566.000,00	94,41	2.892.031.000,00
5.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	9.896.000.000,00	9.602.082.000,00	97,03	16.789.692.450,00
5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	326.697.303.860,00	296.683.427.591,00	90,81	359.476.433.693,00
5.2.2.21.01.	Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	244.813.833.267,00	226.048.360.491,00	92,33	1.079.164.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	78.269.572.200,00	68.400.049.100,00	87,39	22.080.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota (Yang Pendanaannya Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Dan Dana Otonomi Khusus)	3.613.898.393,00	2.235.018.000,00	61,85	358.375.189.693,00
5.2.2.28.	Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti/ Acara	192.400.000,00	169.550.000,00	88,12	93.550.000,00
5.2.2.28.01.	Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti.	192.400.000,00	169.550.000,00	88,12	93.550.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	411.727.488.168,00	406.482.198.541,00	98,73	184.204.790.726,00
5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	-	-	-	2.195.221.407,00
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	-	-	-	2.195.221.407,00
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	1.199.996.550,00	873.371.526,00	72,78	5.950.000,00
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	199.996.550,00	198.496.000,00	99,25	5.950.000,00
5.2.3.16.08.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	1.000.000.000,00	674.875.526,00	67,49	-
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	1.407.427.300,00
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	1.031.570.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6
5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	332.261.300,00
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	-	43.596.000,00
5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	175.000.000,00	173.500.000,00	99,14	272.000.000,00
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur.	175.000.000,00	173.500.000,00	99,14	272.000.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.812.918,00	37.620.000,00	92,18	61.490.000,00
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	40.812.918,00	37.620.000,00	92,18	61.490.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	-	-	-	197.807.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	-	-	-	167.997.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan printer	-	-	-	29.810.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	120.889.000,00
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	-	-	-	88.852.000,00
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	32.037.000,00
5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	-	-	-	74.195.000,00
5.2.3.31.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	74.195.000,00
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	9.000.000,00	8.987.000,00	99,86	17.325.000,00
5.2.3.32.07.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi	9.000.000,00	8.987.000,00	99,86	17.325.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	388.528.678.700,00	385.119.535.015,00	99,12	172.713.674.069,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	356.128.678.700,00	353.554.535.015,00	99,28	137.826.448.176,00
5.2.3.49.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	32.400.000.000,00	31.565.000.000,00	97,42	-
5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja.	-	-	-	34.887.225.893,00
5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	19.076.000.000,00	18.975.536.000,00	99,47	-
5.2.3.50.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	14.076.000.000,00	14.003.000.000,00	99,48	-
5.2.3.50.05.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	5.000.000.000,00	4.972.536.000,00	99,45	-
5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	-	-	-	6.642.921.950,00
5.2.3.60.04.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	-	-	-	6.642.921.950,00
5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	-	-	-	495.890.000,00
5.2.3.68.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	-	-	-	495.890.000,00
5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	2.698.000.000,00	1.293.649.000,00	47,95	-
5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku	2.698.000.000,00	1.293.649.000,00	47,95	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(789.616.954.190,00)	(750.048.357.316,00)	94,99	(599.517.319.252,00)

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6

Banda Aceh, 31 Desember 2016
Kepala Dinas Cipta Karya Aceh

Ir. Zulkifli, MM
NIP. 19620621 199203 1 002



PEMERINTAH ACEH
SKPD : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2018 DAN 2017

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	-	879.391.461,00	-	10.050.000,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	-	879.391.461,00	-	10.050.000,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-	20.050.000,00	-	10.050.000,00
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	-	20.050.000,00	-	10.050.000,00
1.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	-	20.050.000,00	-	10.050.000,00
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	859.341.461,00	-	-
1.1.4.07.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	-	148.878.461,00	-	-
1.1.4.07.04.	Bidang Perumahan Rakyat - LRA	-	148.878.461,00	-	-
1.1.4.16.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	-	710.463.000,00	-	-
1.1.4.16.02.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LRA	-	710.463.000,00	-	-
2.	BELANJA	930.952.600.893,00	499.703.902.934,88	53,68	439.149.878.456,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	65.594.072.227,00	60.751.652.804,00	52,49	59.901.908.715
2.1.1.	Belanja Pegawai	21.886.717.409,00	20.268.740.268,00	92,61	19.978.400.905,00
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.266.337.409,00	11.408.710.668,00	93,01	11.633.725.193,00
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	9.465.260.000,00	8.898.015.154,00	94,01	9.181.294.852,00
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.163.485.700,00	923.893.186,00	79,41	882.621.717,00
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	276.250.000,00	252.140.000,00	91,27	258.780.000,00
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	452.270.000,00	466.138.687,00	103,07	447.750.000,00
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	564.876.000,00	533.300.880,00	94,41	553.071.540,00
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.000.000,00	8.577.148,00	40,84	6.547.502,00
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	-	135.838,00	-	143.479,00
2.1.1.01.25.	Tunjangan Iuran JKK PNS	21.995.709,00	18.349.478,00	83,42	18.918.649,00
2.1.1.01.26.	Tunjangan Iuran JKM PNS	25.200.000,00	55.027.489,00	218,36	23.648.448,00
2.1.1.01.31.	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	276.000.000,00	253.132.808,00	91,71	260.949.006,00
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.587.340.000,00	8.832.745.600,00	92,13	8.328.028.712,00
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	772.608.000,00	710.300.000,00	91,94	697.000.000,00
2.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	6.612.000.000,00	6.505.775.600,00	98,39	5.824.761.100,00
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	2.202.732.000,00	1.616.670.000,00	73,39	1.806.267.612,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	865.358.528.666,00	438.952.250.130,88	86,00	379.247.969.741,00
2.2.1.07.	Uang Lembur	33.040.000,00	27.284.000,00	82,58	16.647.000,00
2.2.1.07.01.	Uang Lembur PNS	33.040.000,00	27.284.000,00	82,58	16.647.000,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	881.716.686.866,00	454.035.227.666,88	51,49	312.988.423.810,00
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.373.390.381,00	943.455.665,00	68,70	1.046.022.395,00
2.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	467.595.757,00	431.237.563,00	92,22	477.641.880,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.479.240,00	13.479.240,00	100,00	29.081.750,00
2.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	21.000.000,00	2.790.000,00	13,29	7.250.000,00
2.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.431.084,00	5.431.084,00	100,00	36.442.323,00
2.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	865.884.300,00	490.517.778,00	56,65	495.606.442,00
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	456.887.800,00	346.652.500,00	75,87	502.433.400,00
2.2.2.02.07.	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	45.625.000,00	17.412.500,00	38,16	22.800.000,00
2.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	16.300.000,00	7.096.000,00	43,53	10.522.000,00
2.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	385.400.000,00	314.004.000,00	81,47	455.654.000,00
2.2.2.02.22.	Belanja bahan kelengkapan lapangan	9.562.800,00	8.140.000,00	85,12	13.457.400,00
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.023.983.000,00	1.379.213.921,00	68,14	1.483.626.017,00
2.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.300.000,00	2.290.010,00	12,51	2.293.232,00
2.2.2.03.02.	Belanja air	48.000.000,00	47.937.200,00	99,87	98.725.390,00
2.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.056.000.000,00	779.537.733,00	73,82	784.357.016,00
2.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	23.652.000,00	20.835.500,00	88,09	20.292.000,00
2.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	108.000.000,00	50.375.078,00	46,64	32.144.229,00
2.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00	-	-	-
2.2.2.03.12.	Belanja jasa publikasi	3.000.000,00	1.200.000,00	40,00	3.600.000,00
2.2.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	168.631.000,00	122.734.000,00	72,78	100.601.150,00
2.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	273.400.000,00	60.630.400,00	22,18	48.405.000,00
2.2.2.03.16.	Belanja jasa cleaning service	120.000.000,00	117.540.000,00	97,95	295.815.000,00
2.2.2.03.18.	Belanja jasa pengolahan lahan dan tanaman	200.000.000,00	176.134.000,00	88,07	97.393.000,00
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.401.671.000,00	987.388.005,00	70,44	893.886.570,00
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	731.100.000,00	633.756.517,00	86,69	547.210.540,00
2.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	498.001.000,00	283.347.068,00	56,90	268.739.545,00
2.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.870.000,00	1.143.320,00	39,84	1.211.320,00
2.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	169.700.000,00	69.141.100,00	40,74	76.725.165,00
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	695.851.600,00	533.434.300,00	76,66	570.702.600,00
2.2.2.06.01.	Belanja cetak	156.309.100,00	140.138.800,00	89,65	146.622.350,00
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	512.042.500,00	369.081.750,00	72,08	396.580.250,00
2.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	27.500.000,00	24.213.750,00	88,05	27.500.000,00
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	345.500.000,00	139.136.000,00	40,27	266.900.000,00
2.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	133.350.000,00	35.016.000,00	26,26	93.000.000,00
2.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	212.150.000,00	104.120.000,00	49,08	173.900.000,00
2.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	-	-	4.800.000,00
2.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	-	-	4.800.000,00
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	645.900.000,00	246.930.500,00	38,23	329.491.000,00
2.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	252.900.000,00	64.530.500,00	25,52	57.251.000,00
2.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	13.000.000,00	-	-	-
2.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	380.000.000,00	182.400.000,00	48,00	272.240.000,00
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	394.630.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	394.630.000,00
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.937.070.000,00	3.261.464.424,00	82,84	2.950.509.911,00
2.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.473.410.000,00	2.852.926.889,00	82,14	2.627.284.545,00
2.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	463.660.000,00	408.537.535,00	88,11	323.225.366,00
2.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	5.280.000.000,00	2.994.183.500,00	56,71	8.432.795.400,00
2.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.000.000,00	-	-	-
2.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.200.000.000,00	2.994.183.500,00	57,58	2.817.433.000,00
2.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	-	-	5.615.362.400,00
2.2.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	407.667.640.635,00	55.272.624.448,00	13,56	286.785.070.567,00
2.2.2.20.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.196.682.657,00	46.242.860.425,00	95,95	166.342.517.545,00
2.2.2.20.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	359.470.957.978,00	9.029.764.023,00	2,51	104.600.365.022,00
2.2.2.20.03.	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota Yang Pendanaannya Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil dan Otonomi	-	-	-	15.842.188.000,00
2.2.2.25.	Honorarium PNS	2.460.250.000,00	1.765.150.000,00	71,75	2.063.510.000,00
2.2.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.450.000,00	30.550.000,00	75,53	191.750.000,00
2.2.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	169.200.000,00	52.200.000,00	30,85	132.800.000,00
2.2.2.25.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	851.400.000,00	524.700.000,00	61,63	561.000.000,00
2.2.2.25.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.159.600.000,00	952.900.000,00	82,17	1.047.400.000,00
2.2.2.25.06.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	239.600.000,00	204.800.000,00	85,48	130.560.000,00
2.2.2.26.	Honorarium Non PNS	7.909.350.000,00	7.061.036.000,00	89,27	7.057.245.950,00
2.2.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	297.805.500,00
2.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	5.953.200.000,00	5.773.043.000,00	96,97	5.831.657.000,00
2.2.2.26.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Operasi/Asisten	1.956.150.000,00	1.287.993.000,00	65,84	927.783.450,00
2.2.2.29.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	40.500.000,00
2.2.2.29.01.	Uang diberikan kepada Pihak Ketiga.	-	-	-	40.500.000,00
2.2.2.30.	Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti	160.400.000,00	76.050.000,00	47,41	166.300.000,00
2.2.2.30.01.	Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti.	160.400.000,00	76.050.000,00	47,41	159.600.000,00
2.2.2.30.02.	Jasa Pembawa/ Pembaca Pada Acara/ Upacara	-	-	-	6.700.000,00
2.2.2.35.	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari DOKA	363.375.809.655,00	302.395.122.003,88	83,22	-
2.2.2.35.01.	Kabupaten Aceh Selatan	25.100.000.000,00	16.403.330.328,00	65,35	-
2.2.2.35.02.	Kabupaten Aceh Tenggara	8.735.000.000,00	7.888.853.000,00	90,31	-
2.2.2.35.03.	Kabupaten Aceh Timur	8.925.000.000,00	8.742.226.150,00	97,95	-
2.2.2.35.05.	Kabupaten Aceh Barat	17.500.000.000,00	16.363.770.000,00	93,51	-
2.2.2.35.06.	Kabupaten Aceh Besar	10.511.090.272,00	9.702.085.000,00	92,30	-
2.2.2.35.07.	Kabupaten Pidie	24.050.000.000,00	18.234.042.000,00	75,82	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.35.08.	Kabupaten Aceh Utara	7.937.110.770,00	7.385.606.274,88	93,05	-
2.2.2.35.09.	Kabupaten Simeulue	14.806.300.000,00	13.746.957.500,00	92,85	-
2.2.2.35.10.	Kabupaten Aceh Singkil	6.060.000.000,00	5.589.297.000,00	92,23	-
2.2.2.35.11.	Kabupaten Bireuen	22.225.000.000,00	19.668.412.250,00	88,50	-
2.2.2.35.12.	Kabupaten Aceh Barat Daya	31.110.000.000,00	27.887.828.518,00	89,64	-
2.2.2.35.13.	Kabupaten Gayo Lues	21.816.364.409,00	13.256.601.400,00	60,76	-
2.2.2.35.14.	Kabupaten Aceh Jaya	16.957.200.000,00	15.191.805.800,00	89,59	-
2.2.2.35.15.	Kabupaten Nagan Raya	7.000.000.000,00	6.153.329.000,00	87,90	-
2.2.2.35.16.	Kabupaten Aceh Tamiang	1.800.000.000,00	1.537.113.000,00	85,40	-
2.2.2.35.17.	Kabupaten Bener Meriah	9.000.000.000,00	8.132.138.000,00	90,36	-
2.2.2.35.18.	Kabupaten Pidie Jaya	32.567.233.421,00	31.196.849.118,00	95,79	-
2.2.2.35.19.	Kota Banda Aceh	17.602.318.126,00	11.001.856.500,00	62,50	-
2.2.2.35.20.	Kota Sabang	44.083.159.002,00	35.233.465.865,00	79,93	-
2.2.2.35.21.	Kota Lhokseumawe	11.700.033.655,00	10.683.742.300,00	91,31	-
2.2.2.35.22.	Kota Langsa	7.390.000.000,00	7.060.600.000,00	95,54	-
2.2.2.35.23.	Kota Subulussalam	16.500.000.000,00	11.335.213.000,00	68,70	-
2.2.2.36.	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota	5.263.024.617,00	4.682.066.000,00	88,96	-
2.2.2.36.03.	Kabupaten Aceh Timur	1.534.922.936,00	1.341.222.000,00	87,38	-
2.2.2.36.06.	Kabupaten Aceh Besar	1.237.981.858,00	1.092.383.000,00	88,24	-
2.2.2.36.11.	Kabupaten Bireuen	1.180.000.000,00	1.101.331.000,00	93,33	-
2.2.2.36.19.	Kota Banda Aceh	600.000.000,00	511.850.000,00	85,31	-
2.2.2.36.23.	Kota Subulussalam	710.119.823,00	635.280.000,00	89,46	-
2.2.2.38.	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Prioritas Pembangunan Aceh Bersumber Dari Otsus Aceh	78.709.158.178,00	71.942.520.400,00	91,40	-
2.2.2.38.04.	Kabupaten Aceh Tengah	4.600.000.000,00	4.340.620.000,00	94,36	-
2.2.2.38.05.	Kabupaten Aceh Barat	1.000.000.000,00	997.870.000,00	99,79	-
2.2.2.38.06.	Kabupaten Aceh Besar	42.494.791.000,00	37.240.615.000,00	87,64	-
2.2.2.38.07.	Kabupaten Pidie	1.300.000.000,00	1.299.800.000,00	99,98	-
2.2.2.38.08.	Kabupaten Aceh Utara	5.320.000.000,00	4.895.769.000,00	92,03	-
2.1.2.38.19.	Kota Banda Aceh	18.994.367.178,00	18.784.836.000,00	98,90	-
2.2.2.38.22.	Kota Langsa	5.000.000.000,00	4.383.010.400,00	87,66	-
2.3.1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.543.269.618,00	3.218.922.000,00	70,85	1.562.106.632,00
2.3.1.01.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	-	-	-	121.703.450,00
2.3.1.02.01.	Belanja modal Pengadaan Pompa	-	-	-	121.703.450,00
2.3.1.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.250.000.000,00	2.956.000.000,00	69,55	842.009.000,00
2.3.1.04.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.250.000.000,00	2.956.000.000,00	69,55	842.009.000,00
2.3.1.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	-	-	-	6.000.000,00
2.3.2.06.03.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Las	-	-	-	6.000.000,00
2.3.2.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	189.245.000,00
2.3.2.10.08.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi	-	-	-	189.245.000,00
2.3.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	-	-	-	1.524.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.3.2.14.02.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	-	-	-	1.524.000,00
2.3.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	112.745.538,00	101.200.000,00	89,76	5.878.182,00
2.3.2.15.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	-	-	-	5.878.182,00
2.3.2.15.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	112.745.538,00	101.200.000,00	89,76	-
2.3.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	21.575.360,00	21.230.000,00	98,40	235.966.000,00
2.3.2.16.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	-	-	-	36.960.000,00
2.3.2.16.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	21.575.360,00	21.230.000,00	98,40	148.979.000,00
2.3.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	-	-	34.319.000,00
2.3.2.16.11.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	-	-	-	15.708.000,00
2.3.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	158.948.720,00	140.492.000,00	88,39	159.781.000,00
2.3.2.17.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	33.921.600,00	33.440.000,00	98,58	85.250.000,00
2.3.2.17.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	20.365.184,00	20.020.000,00	98,31	40.315.000,00
2.3.2.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	11.612.848,00	11.000.000,00	94,72	-
2.3.2.17.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	21.514.240,00	20.900.000,00	97,14	-
2.3.2.17.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	71.534.848,00	55.132.000,00	77,07	34.216.000,00
2.3.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.605.927.000,00	21.988.866.000,00	97,27	98.864.689.109,00
2.3.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.105.927.000,00	21.491.189.000,00	97,22	98.864.689.109,00
2.3.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	981.227.000,00	981.227.000,00	100,00	97.946.667.109,00
2.3.3.01.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.880.000.000,00	20.265.502.000,00	97,06	-
2.3.3.01.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	37.700.000,00	37.700.000,00	100,00	918.022.000,00
2.3.3.01.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	207.000.000,00	206.760.000,00	99,88	-
2.3.3.04.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	500.000.000,00	497.677.000,00	99,54	-
2.3.3.04.03.	Belanja modal Pengadaan Rumah Peningggalan Sejarah	500.000.000,00	497.677.000,00	99,54	-
2.3.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	200.000.000,00	192.147.000,00	96,07	5.756.258.000,00
2.3.4.01.	Belanja modal Pengadaan Jalan	-	-	-	3.871.225.000,00
2.3.4.01.05.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	-	-	-	3.871.225.000,00
2.3.4.11.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	-	-	-	1.885.033.000,00
2.3.4.11.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	1.885.033.000,00
2.3.4.16.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	200.000.000,00	192.147.000,00	96,07	-
2.3.4.16.02.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	200.000.000,00	192.147.000,00	96,07	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	930.952.600.893,00	499.703.902.934,88	53,68	439.149.878.456,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	(930.952.600.893,00)	(498.824.511.473,88)	53,58	(439.139.828.456,00)

Banda Aceh, 31 Desember 2018
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh

Ir. T. Mirzuan, MT.

NIP. 19650803 199502 1 001